

TUGAS AKHIR
ARAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
MINAPOLITAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah sarjana (S1) di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

oleh :

Tri Mar'atul Ummah
153060082



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
Bandung, Juni, 2021

**ARAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
MINAPOLITAN DI KABUPATEN INDRAMAYU**

TUGAS AKHIR

Oleh:

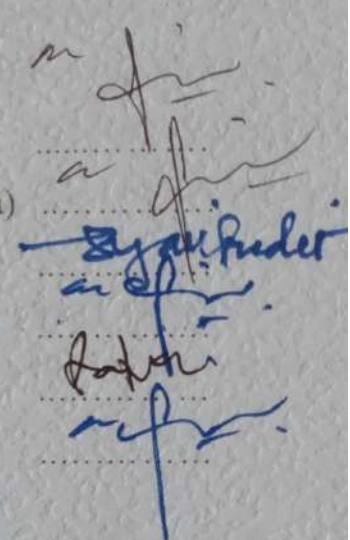
Tri Mar'atul Ummah

153060082

Bandung, 14 Juni 2021

Menyetujui,

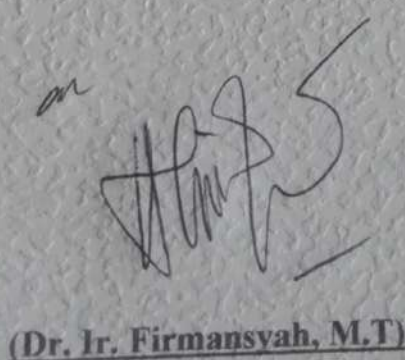
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Ir. Reza Martani Surdia, MT | (Ketua Sidang) |
| 2. Ir. Supratignyo Aji, MT | (Pembimbing Utama) |
| 3. Deden Syarifudin, ST., MT | (Co-Pembimbing) |
| 4. Apriadi Budi Raharja, ST, M.Si | (Penguji) |
| 5. Ratih Rantini, ST, MT | (Penguji) |
| 6. Ir. Reza Martani Surdia, MT | (Penguji) |



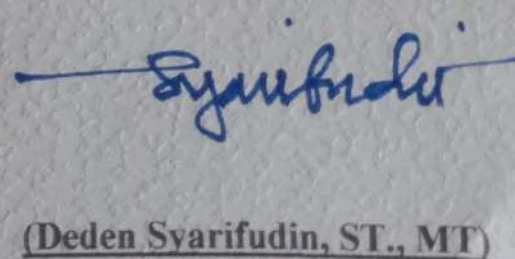
Mengetahui,

Koordinator TA dan Sidang Sarjana

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**



(Dr. Ir. Firmansyah, M.T)



(Deden Syarifudin, ST., MT)

**ARAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN MINAPOLITAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

TUGAS AKHIR



Nama : Tri Mar'atul Ummah

NRP : 153060082

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Co-Pembimbing

(Ir. Supratignyo Aji, MT)

(Deden Syarifudin, ST., MT)

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota**

(Deden Syarifudin, ST., MT)

ABSTRAK

Kawasan Minapolitan merupakan turunan dari Kawasan Agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dengan sistem minabisnis. Dalam pengembangan kawasan minapolitan terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan diantaranya yaitu pertimbangan pengembangan infrastruktur dan sarana untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Berdasarkan SK Menteri KKP Nomor KEP.32/MEN/2010 dan Kep. Bupati Indramayu Nomor 523/Kep. 24-Diskanla/2011, Kabupaten Indramayu telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang berpotensi besar dalam produksi perikanan dan kelautan. Sehingga Kabupaten Indramayu menjadi salah satu produksi perikanan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil produksi yang mencapai 134.713 ton pada tahun 2017. Namun, keadaan tersebut tidak diikuti dengan tersedianya infrastruktur yang memadai. Seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung minapolitan yang meliputi balai benih ikan, *docking* kapal, lahan tempat pelelangan ikan yang kurang luas, kapasitas *cold storage*, gudang penyimpanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka dilakukan analisis terkait arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui penyebaran kuisioner serta analisis AHP. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan prioritas infrastruktur yang dapat dikembangkan meliputi Balai Benih Ikan, *hatchery*, dermaga, *cold storage*, tempat pelelangan ikan dan utilitas.

Kata kunci : Kawasan Minapolitan, Analytical Hierarchy Process (AHP), Infrastruktur

ABSTRACT

The Minapolitan area is a derivative of the Agropolitan Area, namely an area consisting of one or more activity centers in rural areas as a fishery production system and the management of certain natural resources. This is indicated by the functional linkages and the spatial hierarchy of the residential system unit with the mineral business system. In the development of the Minapolitan area, there are several considerations that need to be made, including the consideration of infrastructure and facilities development for agribusiness development and systems. Based on the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Decree Number KEP.32 / MEN / 2010 and Kep. Bupati Indramayu Number 523 / Kep. 24-Diskanla / 2011, Indramayu Regency has been designated as the location for the development of the Minapolitan area. Indramayu Regency is an area that has great potential in fisheries and marine production. Therefore, Indramayu Regency becomes one of the largest fisheries production in West Java Province. This is evidenced by the production which reached 134,713 tonnes in 2017. However, this situation was not followed by the availability of adequate infrastructure. Such as the lack of supporting facilities and infrastructure for Minapolitan which includes a fish seed center, boat docking, less extensive land for fish auction, cold storage capacity, storage warehouse, and others. Therefore, an analysis was carried out related to the direction of infrastructure development in the Minapolitan area using quantitative and qualitative descriptive methods through distributing questionnaires and AHP (Analytical Hierarchy Process) analysis. Based on the analysis results, it is found that the priority infrastructure that can be developed includes the Fish Seed Center, hatchery, jetty, cold storage, fish auction and utilities.

Keywords: Minapolitan Area, Analytical Hierarchy Process (AHP), Infrastructure

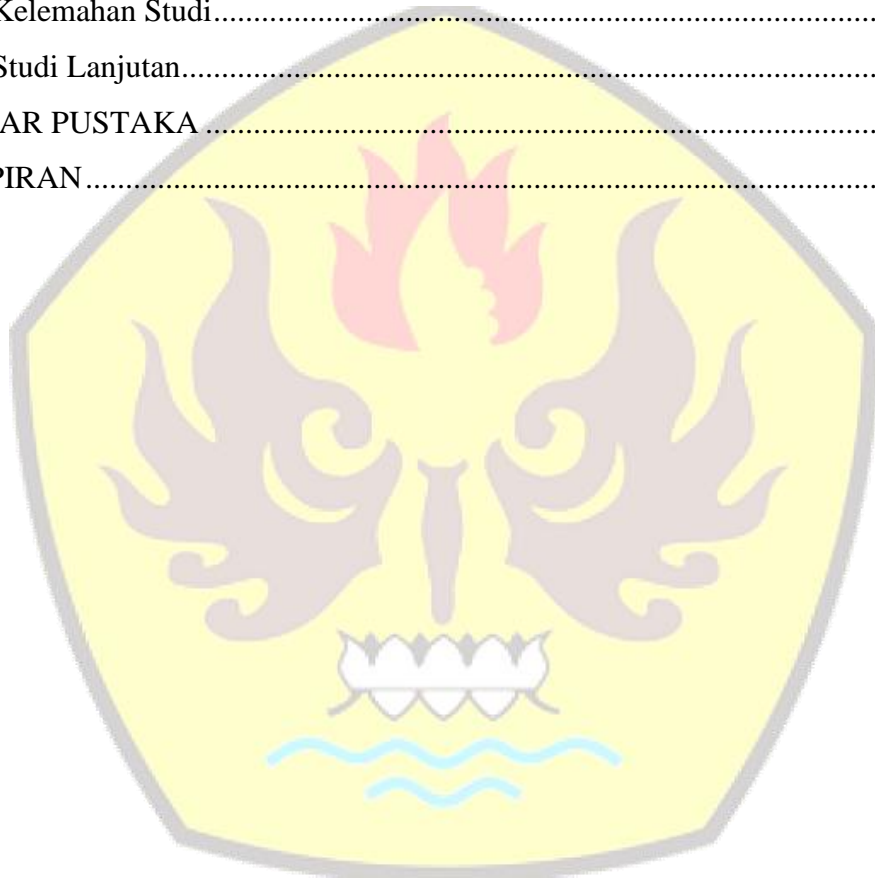
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Sasaran	4
1.4 Ruang Lingkup	5
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi	5
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	7
1.5 Metodologi.....	10
1.5.1 Metode Pendekatan	10
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	11
1.5.3 Metode Analisis	23
1.5.4 Batasan Studi.....	32
1.5.5 Variabel Penelitian	32
1.5.6 Kerangka Pemikiran.....	34
1.5.7 Sistematika Penyusunan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
2.1 Teori Pengembangan Wilayah.....	36
2.1.1 Teori Keynes dan Neo-Keynes	36
2.1.2 Teori Klasik dan Neoklasik.....	36
2.1.3 Teori Dasar Ekonomi atau Teori Dasar Ekspor	37
2.1.4 Teori Pentahapan (<i>Stages Theory</i>)	37
2.1.5 Perkembangan Yang Tidak Berimbang (<i>Unbalanced</i>	

	<i>Development</i>)	38
2.2	Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu.....	38
2.3	Minapolitan.....	38
2.3.1	Pengertian dan Karakteristik Kawasan Minapolitan.....	39
2.3.2	Ciri Kawasan Minapolitan	39
2.3.3	Persyaratan Kawasan Minapolitan.....	40
2.3.4	Kriteria Pengembangan Kawasan Minapolitan.....	44
2.3.5	Aspek Generik dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan	45
2.3.6	Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan.....	47
2.3.7	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kawasan Minapolitan.....	50
2.4	Infrastruktur	51
2.5	Tinjauan Kebijakan.....	52
2.5.1	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	52
2.5.2	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan.....	53
2.5.3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan	62
2.5.4	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029	68
2.6	Studi Terdahulu	74
	BAB III GAMBARAN UMUM	84
3.1	Pengembangan Kawasan Minapolitan.....	84
3.1.1	Penetapan Kawasan Minapolitan	84
3.1.2	Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu	86
3.1.3	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu	88
3.1.4	Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu.....	90
3.2	Gambaran Umum Kabupaten Indramayu.....	92
3.2.1	Letak dan Kondisi Geografis	92
3.2.2	Topografi.....	94
3.2.3	Hidrologi	94

3.2.4	Konsumsi Ikan	99
3.3	Gambaran Umum Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu.....	99
3.3.1	Kondisi Fisik Geografis	99
3.3.2	Demografi	101
3.3.3	Penggunaan Lahan	101
3.3.4	Karakteristik Kawasan Minapolitan.....	105
3.3.5	Perikanan Tangkap.....	108
3.3.6	Perikanan Budidaya	111
3.3.7	Pengolahan Hasil Perikanan.....	115
3.3.8	Garam Rakyat.....	116
3.3.9	Rantai Bisnis Perikanan	119
3.4	Kondisi Infrastruktur	122
3.4.1	Infrastruktur Ekonomi Kegiatan Minapolitan.....	122
3.4.2	Infrastruktur Dasar	136
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		147
4.1	Analisis Konvergensi Kebijakan	147
4.1.1	Analisis Konvergensi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan	148
4.1.2	Analisis Konvergensi Kebijakan Pusat Pelayanan dan Infrastruktur Dasar	148
4.1.3	Analisis Konvergensi Kebijakan Infrastruktur Kegiatan Ekonomi Perikanan	149
4.2	Analisis Potensi Kawasan Minapolitan	150
4.2.1	Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.....	150
4.2.2	Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya	154
4.2.3	Kawasan Minapolitan Pengolahan Hasil Perikanan	157
4.2.4	Kawasan Minapolitan Garam.....	161
4.2.5	Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu.....	164
4.3	Analisis Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur Kawasan Minapolitan.....	167
4.4	<i>Analytical Hierarchy Process</i>	173
4.4.1	Sub Sistem Perikanan.....	173

4.4.2	Sub Sistem Usaha Budidaya	174
4.4.3	Sub Sistem Hilir Pengolahan Hasil	175
4.4.4	Sub Sistem Hilir Pemasaran.....	176
4.4.5	Sub Sistem Penunjang.....	176
4.5	Arahan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Minapolitan.....	177
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		184
5.1	Kesimpulan	184
5.2	Rekomendasi.....	187
5.3	Kelemahan Studi.....	188
5.4	Studi Lanjutan.....	188
DAFTAR PUSTAKA		190
LAMPIRAN.....		192



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Luas Wilayah Penelitian per Kecamatan di Kabupaten Indramayu	8
Tabel I.2 <i>Ground Check</i>	12
Tabel I.3 Daftar Instansi	13
Tabel I.4 Perbandingan Metode Sampling	15
Tabel I.5 Pengelompokan <i>Stakeholder</i> Berdasarkan Tingkat Kepentingan	18
Tabel I.6 Responden Penelitian	20
Tabel I.7 Jumlah Responden <i>Governance</i> dan <i>Civil Society</i>	22
Tabel I.8 Jumlah Responden <i>Private Sector</i>	22
Tabel I.9 Intensitas Kepentingan menurut Saaty	27
Tabel I.10 Matriks Analisis	28
Tabel II.1 Matriks Keterkaitan Penelitian	74
Tabel III.1 Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu	86
Tabel III.2 Ibukota Kecamatan, Banyaknya Desa Pantai dan Panjang Garis Pantai	99
Tabel III.3 Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2018	101
Tabel III.4 Luas Guna Lahan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	101
Tabel III.5 Jumlah Produksi Perikanan Tangkapan di Laut per Kecamatan Tahun 2018	108
Tabel III.6 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan Tahun 2016-2018	109
Tabel III.7 Jumlah Nelayan Menurut Status Nelayan per Kecamatan Tahun 2017	111
Tabel III.8 Luas Lahan Tambak dan Kolam per Kecamatan Tahun 2019	111
Tabel III.9 Data Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Kolam Tahun 2019	112
Tabel III.10 Data Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Tambak Tahun 2019	113
Tabel III.11 Industri Pengolahan Hasil Perikanan Per Kecamatan Tahun 2019	115
Tabel III.12 Potensi Lahan Garam Tahun 2018	117

Tabel III.13 Jumlah Alat Penangkapan Ikan per Kecamatan Tahun 2017	124
Tabel III.14 Jumlah Armada Penangkapan Ikan per Kecamatan Tahun 2017 ...	125
Tabel III.15 Daftar TPI	129
Tabel III.16 Produksi dan Nilai Produksi Ikan di Masing-Masing KUD dan TPI Tahun 2017-2019	130
Tabel III.17 Kondisi Jalan Berdasarkan Panjang dan Persentase di Kabupaten Indramayu Tahun 2018	136
Tabel III.18 Konstruksi Jalan Berdasarkan Panjang dan Persentase di Kabupaten Indramayu Tahun 2018	136
Tabel III.19 Jumlah Pelanggan PDAM dan Air yang Disalurkan	138
Tabel III.20 Jumlah Pelanggan Listrik Pra Bayar dan Pasca Bayar Tahun 2018.....	138
Tabel III.21 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Tahun 2018..	140
Tabel III.22 Jumlah Sarana Pendidikan Tahun 2018	141
Tabel III.23 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2018.....	142
Tabel III.24 Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2018	143
Tabel III.25 Jumlah Sarana Peribadatan Tahun 2018	144
Tabel IV. 1 Klasifikasi Potensi Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap	152
Tabel IV. 2 Klasifikasi Potensi Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya.....	155
Tabel IV. 3 Klasifikasi Potensi Kawasan Minapolitan Pengolahan Hasil Perikanan.....	159
Tabel IV. 4 Klasifikasi Potensi Kawasan Minapolitan Garam	162
Tabel IV. 5 Klasifikasi Potensi Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu ..	164
Tabel IV.6 Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur di Kawasan Minapolitan Kab. Indramayu	167
Tabel IV.7 Nilai <i>Random Index</i>	173
Tabel IV.8 Matriks Arah Pengembangan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Luas Wilayah Penelitian per Kecamatan di Kabupaten Indramayu	8
Gambar I.2 Peta Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu.....	9
Gambar I.3 Bagan Metode Pendekatan Sasaran 1	10
Gambar I.4 Bagan Metode Pendekatan Sasaran 2	11
Gambar I.5 Bagan Metode Pendekatan Sasaran 3	11
Gambar I.6 Grafik Kepentingan dan Pengaruh Relatif dari Berbagai <i>Stakeholder</i>	18
Gambar I.7 Perbandingan Metode Sampling	25
Gambar III.1 Peta Kawasan Minapolitan (Perikanan)	85
Gambar III.2 Peta Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu	87
Gambar III.3 Peta Zona Inti Kawasan Minapolitan	89
Gambar III.4 Peta Administrasi Kabupaten Indramayu.....	93
Gambar III.5 Peta Topografi	96
Gambar III.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)	97
Gambar III.7 Peta Cekungan Air Tanah (CAT).....	98
Gambar III.8 Peta Wilayah Penelitian	100
Gambar III.9 Peta Guna Lahan Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu ..	103
Gambar III.10 Peta Sistem Perkotaan Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu.....	104
Gambar III.11 Peta Zona Kawasan Minapolitan.....	107
Gambar III.12 Foto Lahan Tambak dan Tempat Pengumpulan Hasil Perikanan	112
Gambar III.13 Foto Pengolahan Hasil Perikanan	116
Gambar III.14 Foto Lahan Tambak Garam.....	118
Gambar III.15 Rantai Bisnis Perikanan Tangkap	119
Gambar III.16 Rantai Bisnis Perikanan Budidaya	120
Gambar III.17 Rantai Bisnis Pengolahan Hasil Perikanan	120
Gambar III.18 Rantai Bisnis Garam Rakyat	121
Gambar III.19 Foto Kolam Indukan dan Kolam <i>Hatchery</i>	123
Gambar III.20 Foto Larva Ikan	123
Gambar III.21 Foto Tambak dan Benih Udang	123

Gambar III.22 Foto Gudang Pakan	124
Gambar III.23 Foto Alat Tangkap.....	125
Gambar III.24 Foto Armada Penangkapan Ikan (Perahu)	126
Gambar III.25 Foto <i>Docking</i> Kapal	126
Gambar III.26 Foto Dermaga	127
Gambar III.27 Foto Tempat Penjemuran	127
Gambar III.28 Foto <i>Cold Storage</i> di TPI Karangsong.....	128
Gambar III.29 Foto Depot dan Mesin Penghancur Es	128
Gambar III.30 Foto UPTD dan <i>Home Industri</i>	129
Gambar III.31 Foto Hasil Industri Kerupuk.....	129
Gambar III.32 Foto Beberapa Permasalahan di TPI Kabupaten Indramayu	132
Gambar III.33 Peta Lokasi TPI	133
Gambar III.34 Foto Pasar Ikan.....	134
Gambar III.35 Peta Infrastruktur Kegiatan Ekonomi di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	135
Gambar III.36 Foto Kondisi Akses Jalan Masuk TPI.....	136
Gambar III.37 Peta Jaringan Jalan	137
Gambar III.38 Foto Kondisi SUTET	139
Gambar III.39 Foto Kondisi Drainase.....	139
Gambar III.40 Foto Kondisi Jaringan Telekomunikasi	140
Gambar III.41 Foto Sarana Pendidikan.....	142
Gambar III.42 Foto Sarana Perdagangan	143
Gambar III.43 Foto Sarana Kesehatan	144
Gambar III.44 Foto Sarana Peribadatan.....	145
Gambar III.45 Foto Sarana Olahraga	145
Gambar III.46 Peta Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu.....	146
Gambar IV. 1 Grafik Alur Analisis.....	147
Gambar IV. 2 Peta Potensi Perikanan Tangkap di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	153
Gambar IV. 3 Peta Potensi Perikanan Budidaya di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	156

Gambar IV. 4	Peta Potensi Pengolahan Hasil Perikanan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	160
Gambar IV. 5	Peta Potensi Garam di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	163
Gambar IV. 6	Peta Potensi Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	166
Gambar IV.7	Peta Kondisi Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	172
Gambar IV.8	Hasil Perhitungan Analisis Infrastruktur Sub Sistem Perikanan ..	173
Gambar IV.9	Grafik Persentase Infrastruktur Sub Sistem Perikanan	174
Gambar IV.10	Grafik Persentase Infrastruktur Sub Sistem Usaha Budidaya.....	174
Gambar IV.11	Hasil Perhitungan Analisis Infrastruktur Sub Sistem Hilir Pengolahan Hasil	175
Gambar IV.12	Grafik Persentase Infrastruktur Sub Sistem Hilir Pengolahan Hasil.....	175
Gambar IV.13	Grafik Persentase Infrastruktur Sub Sistem Hilir Pemasaran	176
Gambar IV.14	Hasil Perhitungan Analisis Infrastruktur Sub Sistem Penunjang	176
Gambar IV.15	Grafik Persentase Infrastruktur Sub Sistem Penunjang	177
Gambar IV.16	Peta Arah Pengembangan Infrastruktur Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu	183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah adalah kesatuan geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Suatu wilayah tentunya memerlukan perencanaan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) untuk dapat dikembangkan dan menumbuhkan/mendorong kegiatan perekonomian yang ada dengan prinsip keberlanjutan (Raharja, Aji, & Syarifudin, 2020). Perencanaan yang digunakan untuk pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan karakteristik dari daerah itu sendiri (Aji & Syarifudin, 2015). Untuk daerah dengan karakteristik perikanan, maka konsep yang digunakan untuk mengembangkan wilayah tersebut adalah Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah suatu pendekatan *bottom up planning*, dimana diperlukan adanya partisipasi aktif serta keterlibatan seluruh *stakeholder* (masyarakat agribisnis, investor dan pemerintah daerah) dalam membangun ekonomi (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan wilayah sekitarnya (*hinterland*). Sebagai suatu prakarsa masyarakat (*people created*) perlu fasilitasi Pemerintah Daerah utamanya dari dimensi perencanaan, pembangunan prasarana dan sarana dasar serta monetesi perdesaan (Syarifudin & Ishak, 2020). Oleh karenanya, pengembangan kawasan minapolitan perlu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut (Agung, 2017):

- a. Perlu didukung kebijakan-kebijakan antar instansi pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam memfasilitasi pengembangan sistem dan usaha agribisnis;
- b. Perlu pengembangan infrastruktur dan sarana yang diperlukan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis;

- c. Perlu adanya lembaga-lembaga yang menangani permodalan, pengelolaan, pemasaran, dan penyedia jasa yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis;
- d. Perlu adanya jejaring kerjasama usaha di antara pelaku-pelaku usaha agribisnis; serta
- e. Perlu adanya suatu unit manajemen khusus yang solid yang mengelola kawasan minapolitan.

Program Minapolitan merupakan program rumpun Agropolitan yang secara fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan baik pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air tawar, termasuk produk-produk olahan dan jasa lingkungan perairan dalam suatu *cluster* kawasan yang terdiri dari beberapa desa atau kecamatan, sebagai upaya mewujudkan kesejajaran antara kota dengan desa (Prasetyo, 2019). Tujuan konsep Minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang dikembangkan tidak saja *on farm* tetapi juga *off farm* seperti sarana perikanan dan jasa penunjang lainnya (Cahya, 2013).

Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) sebagai lokasi pengembangan minapolitan berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan serta didukung oleh Rencana Tata Ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 sebagai upaya pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan yang salah satu perwujudannya yaitu pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 523/Kep. 24-Diskanla/2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu, terdapat 4 kecamatan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Minapolitan meliputi Minapolitan garam berada di Desa Santing Kecamatan Losarang, Minapolitan perikanan tangkap berada di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu, Minapolitan perikanan budidaya di Desa Karanganyar Kecamatan Pasekan dan Desa Krimun

Kecamatan Losarang, serta Minapolitan pengolahan hasil perikanan berada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang.

Penerapan kebijakan Minapolitan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam pengembangannya (Apriliani et al. 2017). Pada hasil penelitian terdahulu membahas mengenai belum optimalnya pengelolaan TPI Karangsong Indramayu dimana sebagian besar perahu kecil yang masuk di kawasan Pelabuhan PPI Karangsong Indramayu tidak mendaratkan dan tidak menjual atau melelangkan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Penyebab dari hal tersebut yaitu kapasitas daya tampung pelabuhan yang belum memadai serta kapasitas TPI yang masih terbatas (Sam'un, 2017).

Berdasarkan isu yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai “Arahan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu”. Pada penelitian ini diharapkan dapat terumuskannya rekomendasi terkait infrastruktur bagi pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Indramayu.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat dikembangkan menjadi Kawasan Minapolitan, suatu wilayah dalam hal ini sistem kewilayahan kabupaten harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi yang akan dikembangkan. Selain memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan, Kawasan Minapolitan hendaknya telah memiliki sistem mata rantai produksi (hulu–hilir), kelayakan daerah, dukungan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, jaringan listrik, dan air bersih, serta dukungan berbagai fasilitas minabisnis seperti pasar, balai benih ikan, lembaga keuangan, dan kelompok budidaya.

Sistem infrastruktur yang tersedia menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan Kawasan Minapolitan. Infrastruktur tersebut membentuk struktur ruang, seperti jaringan jalan, sumber air, jaringan listrik, dan jaringan

telekomunikasi yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan.

Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang berpotensi besar dalam produksi perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Barat. Hasil produksi perikanan di Kabupaten Indramayu merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Barat. Pada tahun 2017 hasil tangkapan ikan Kabupaten Indramayu sebesar 52,28% atau 134.713 ton dari hasil tangkapan ikan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Indramayu memiliki kapal perikanan tangkap paling banyak di Provinsi Jawa Barat.

Namun, keadaan tersebut tidak diikuti dengan tersedianya infrastruktur yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, nelayan, petugas TPI dan bakul (juragan ikan) yang ada di Kabupaten Indramayu bahwa sarana dan prasarana perikanan yang ada belum memadai seperti lahan TPI yang kurang luas, kapasitas *cold storage* dan gudang penyimpanan belum mencukupi, belum terdapat BBI, jaringan jalan yang rusak, buruknya jaringan irigasi, dll (Survey Pendahuluan, 08 Januari 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka disusun beberapa pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik wilayah Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana ketersediaan dan kondisi infrastruktur di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu?
3. Arah apa yang harus dilakukan dalam pengembangan infrastruktur di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk merumuskan strategi pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Teridentifikasinya karakteristik wilayah Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu
2. Teridentifikasinya ketersediaan dan kondisi infrastruktur Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu
3. Terumuskannya arahan pengembangan infrastruktur di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibuat agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mempermudah peneliti serta pembaca. Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah. Berikut ini adalah penjelasan ruang lingkup wilayah dan materi dalam penelitian ini:

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini akan membahas mengenai peran penting infrastruktur bagi pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu khususnya pada sektor perikanan. Hal ini menjadi dasar untuk membuat arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu. Ruang lingkup substansi yang terdapat dalam penelitian ini, meliputi:

1. Mengidentifikasi karakteristik Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu
Karakteristik Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu diidentifikasi melalui tinjauan pustaka, data primer dan data sekunder terkait dengan kondisi terkini Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu. Untuk mengidentifikasi karakteristik dan kondisi Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu dilihat dari kesesuaian dengan rencana yang ada (Rencana Strategis, RTRW, RZWP3K serta RPJM), letak geografis kawasan, kondisi fisik dasar, guna lahan, kondisi demografi, struktur perekonomian, komoditas unggulan perikanan, kondisi perikanan (volume dan nilai produksi, produktivitas, harga ikan), rantai bisnis perikanan, serta potensi kegiatan ekonomi kawasan minapolitan.
2. Mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi infrastruktur Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu
Ketersediaan dan kondisi infrastruktur (sarana dan prasarana) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu diidentifikasi dengan melihat kondisi

eksisting sarana dan prasarana yang ada dengan membandingkan terhadap peraturan terkait, yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan. Berikut ini rinciannya:

- a. Sub-sistem bisnis perikanan, terdiri dari:
 - 1) Balai Benih Ikan, *Hatchery*;
 - 2) Kolam, tambak atau wadah budidaya;
 - 3) Gudang pakan;
 - 4) Peralatan penangkapan ikan; dan
 - 5) Armada penangkapan ikan.
- b. Sub-sistem usaha budidaya, terdiri dari:
 - 1) Penyediaan tempat pengumpul hasil (*Handling Space*) produk perikanan budidaya; dan
 - 2) Dermaga, tempat pendaratan ikan dan tambatan perahu pada kawasan nelayan.
- c. Sub-sistem hilir-pengolahan hasil, terdiri dari:
 - 1) Sarana penjemuran rumput laut dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) Gudang penyimpanan hasil perikanan/rumput laut, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*) *packing house*, sebagai tempat sortasi dan pengepakan; dan
 - 3) Sarana industri kecil, termasuk *food services*, seperti: tempat pembuatan keripik udang/ikan, ikan aspa, abon dsb.
- d. Sub-sistem hilir-pemasaran, terdiri dari:
 - 1) Tempat pelelangan ikan; dan
 - 2) Pasar ikan.
- e. Sub-sistem penunjang, terdiri dari:
 - 1) Sarana utilitas umum, seperti: jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telpon dan internet;
 - 2) Sarana pelayanan umum, seperti: sarana perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, perkantoran, peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau, dll; dan

- 3) Sarana kelembagaan, seperti: badan pengelola, kantor perbankan, koperasi, unit-unit usaha dan lain-lain.
3. Terumuskannya arahan pengembangan infrastruktur Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu

Arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan diperoleh berdasarkan hasil sasaran ke 1 dan ke 2 serta hasil analisis AHP (*Analitycal Hierarchi Process*) yang dilakukan melalui survei primer (kuisisioner) kepada pihak terkait untuk menentukan prioritas arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Secara geografis Kabupaten Indramayu terletak pada $107^{\circ}52'$ - $108^{\circ}36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}15'$ - $6^{\circ}40'$ Lintang Selatan. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa, yang melalui 11 kecamatan dengan 36 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai 147 Km.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031, telah ditetapkan kawasan minapolitan meliputi:

- a. Minapolitan garam berada di Desa Santing Kecamatan Losarang;
- b. Minapolitan perikanan tangkap berada di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu;
- c. Minapolitan perikanan budidaya berada di Desa Karanganyar Kecamatan Pasekan dan Desa Krimun Kecamatan Losarang; serta
- d. Minapolitan pengolahan hasil perikanan berada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang.

Kabupaten Indramayu memiliki 14 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan satu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang dilengkapi dengan TPI yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Indramayu, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Sukra, Kecamatan Patrol, Kecamatan Losarang, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Karangampel dan Kecamatan Balongan.

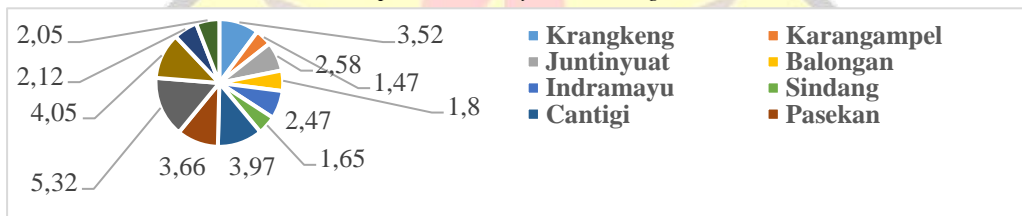
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, wilayah yang menjadi lokasi peneliti terdiri dari sepuluh kecamatan. Dimana kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan bibir pantai, memiliki PPI/TPI serta telah ditetapkan

sebagai kawasan minapolitan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu. Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Balongan, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Pasekan, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol yang berada di Kabupaten Indramayu. Berikut ini daftar Kecamatan beserta luas yang menjadi ruang lingkup wilayah dalam penelitian:

Tabel I.1 Luas Wilayah Penelitian per Kecamatan di Kabupaten Indramayu

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Krangkeng	73,93	3,52	7.	Cantigi	83,32	3,97
2.	Karangampel	30,80	1,47	8.	Pasekan	76,78	3,66
3.	Juntinyuat	54,14	2,58	9.	Losarang	111,61	5,32
4.	Balongan	37,74	1,80	10.	Kandanghaur	85,07	4,05
5.	Indramayu	51,78	2,47	11.	Sukra	44,50	2,12
6.	Sindang	34,68	1,65	12.	Patrol	43,06	2,05

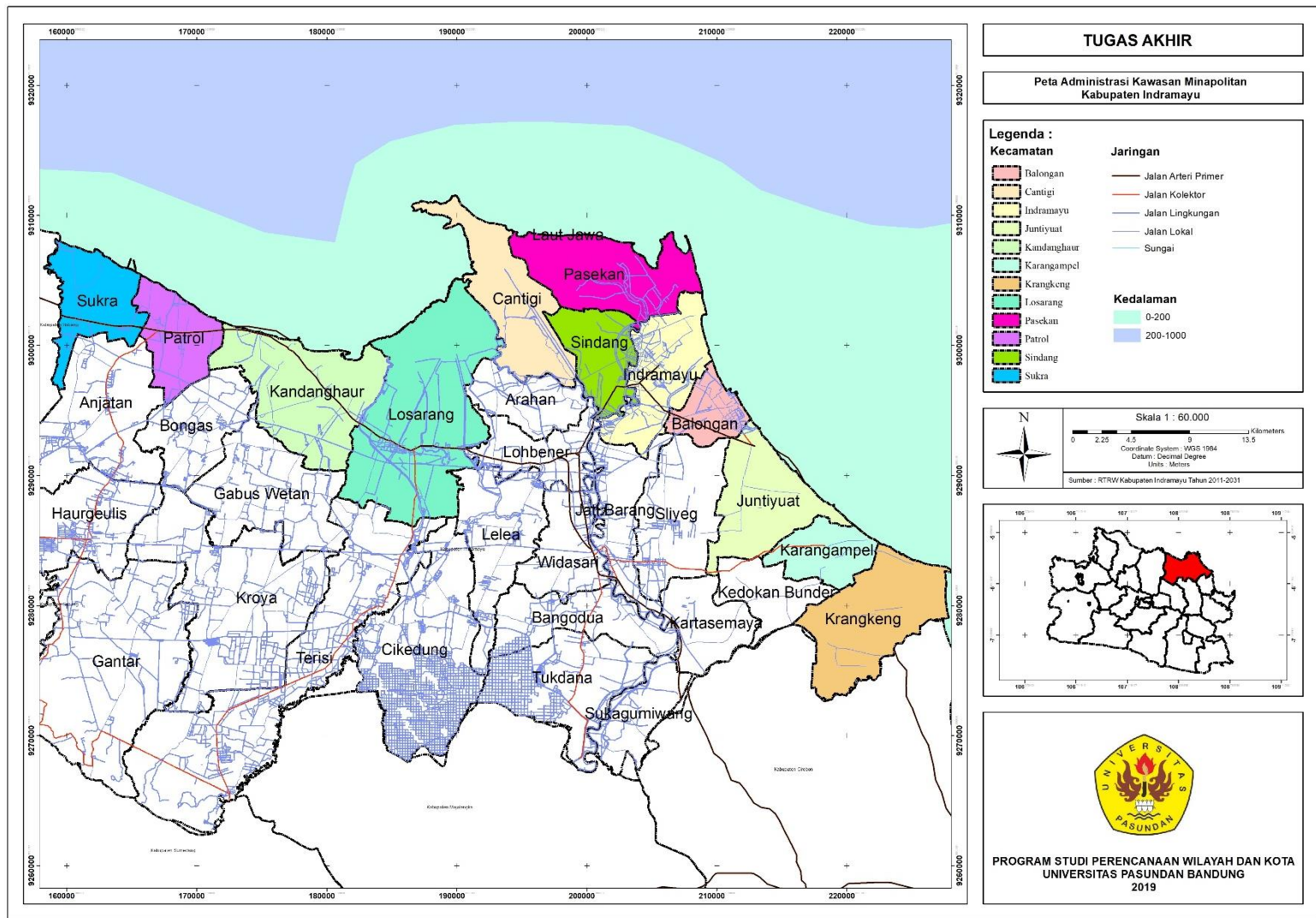
Sumber : Kabupaten Indramayu Dalam Angka Tahun 2019



Gambar I.1 Luas Wilayah Penelitian per Kecamatan di Kabupaten Indramayu

Sumber : Kabupaten Indramayu Dalam Angka Tahun 2019





Gambar I.2 Peta Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu

Sumber : RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031

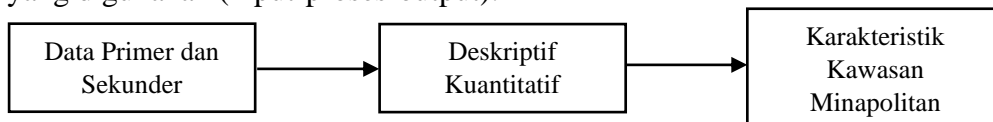
1.5 Metodologi

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*Mixed Method*). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi terkait ketersediaan dan kondisi infrastruktur kawasan minapolitan dengan cara membandingkan antara kondisi eksisting dilapangan dengan peraturan yang ada, mengetahui potensi dan masalah pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan, serta mengetahui kebutuhan infrastruktur dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dari kawasan minapolitan Kabupaten Indramayu dilihat dari kondisi (kebijakan, sosial, ekonomi, kependudukan, guna lahan, fisik dasar, dll) serta untuk merumuskan prioritas arahan pengembangan infrastruktur di kawasan minapolitan Kabupaten Indramayu.

A. Karakteristik Kawasan Minapolitan

Pada sasaran ini metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan input data berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data rantai bisnis perikanan yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan meliputi kebijakan terkait (Rencana Strategis, RTRW, RZWP3K Provinsi Jawa Barat, Masterplan Kawasan Minapolitan), letak geografis kawasan, kondisi fisik dasar, guna lahan, kondisi demografi, struktur perekonomian, komoditas unggulan perikanan, kondisi perikanan (volume, nilai produksi, produktivitas ikan), serta potensi kegiatan ekonomi kawasan minapolitan. Berikut ini terdapat bagan dari metode yang digunakan (input-proses-output):

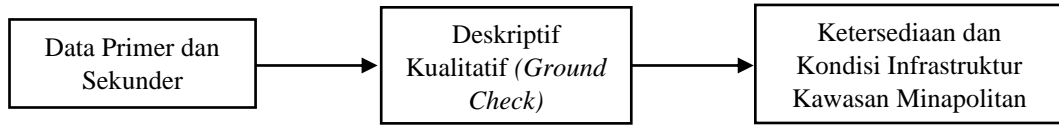


Gambar I.3 Bagan Metode Pendekatan Sasaran 1

B. Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur Kawasan Minapolitan

Pada sasaran ini metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan input data berupa data primer. Data primer yang digunakan berupa hasil *ground check* untuk melihat ketersediaan dan kondisi infrastruktur eksisting yang

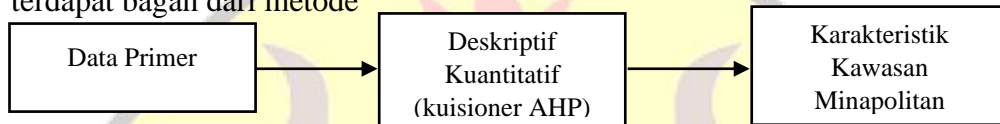
kemudian dibandingkan dengan peraturan terkait. Berikut ini terdapat bagan dari metode yang digunakan (input-proses-output):



Gambar I.4 Bagan Metode Pendekatan Sasaran 2

C. Arah Pengembangan Infrastruktur Kawasan Minapolitan

Pada sasaran ini metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan input data berupa data primer. Data primer yang digunakan berupa hasil penyebaran kuisisioner untuk mendapatkan arahan infrastruktur prioritas dalam mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu. Berikut ini terdapat bagan dari metode



Gambar I.5 Bagan Metode Pendekatan Sasaran 3

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan penelitian yang dikaji. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

A. Metode Pengumpulan Data Primer

Survei primer adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung (observasi lapangan), wawancara serta melalui kuesioner. Survei primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi dengan melihat dan mendengar fakta yang ada tanpa harus mengambil sampel ataupun dengan mengambil sampel. Survei primer dilakukan sebagai upaya melengkapi data sekunder yang telah ada. Survei data primer terdiri atas:

1. *Ground Check*

Ground check dilakukan untuk membandingkan ketersediaan dan kondisi dari infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan yang ada dilapangan.

Tabel I.2 Ground Check

Poin Observasi	Metode Observasi	Alat	Dokumentasi
Mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi infrastruktur kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu	Melakukan <i>checklist</i> mengenai ketersediaan serta mengamati kondisi infrastruktur yang ada di kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu	<i>Checklist</i> Data, Kamera Digital atau Kamera Handphone	Tabel dan Foto

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini, responden wawancara yang dituju diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pelaku industri, pengusaha tambak ikan, nelayan dan petani garam.

Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk mengetahui informasi terkait arahan dan strategi yang digunakan dalam rangka pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu serta harapan yang ingin dicapai dalam pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan yang ada di Kabupaten Indramayu.

Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada pelaku industri, pengusaha tambak ikan, nelayan dan petani garam ditujukan untuk mengetahui hasil dan nilai produksi, rantai bisnis perikanan, kendala yang dihadapi, harapan kepada pihak pemerintahan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Form wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

3. Kuisisioner

Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam upaya memberikan jawaban ilmiah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam kuisisioner semua pertanyaan dan pernyataan telah dirumuskan sedemikian rupa dan peneliti melaksanakan sesuai dengan rumusan yang telah ada. Banyak sedikitnya pertanyaan dan pernyataan yang dirumuskan tergantung pada tujuan penelitian dan hal tersebut akan menentukan macam dan banyak sedikitnya data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini kuisisioner ditujukan kepada stakeholders terkait, dimana stakeholders tersebut dikelompokkan menjadi 3 yaitu *governance*; *privat sector*; dan *civil society*. Kuisisioner digunakan untuk merumuskan prioritas arahan yang sesuai untuk pengembangan infrastruktur Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu yang kemudian akan dilakukan analisis dengan menggunakan AHP (*Analitycal Hierarchi Process*). Untuk form kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut ini terdapat tabel data dan perolehan data primer yang dibutuhkan:

Tabel 1.3 Data dan Perolehan Data Primer

No.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data
1.	Ketersediaan dan kondisi infrastruktur	Pendapat <i>stakeholder</i> dan wilayah penelitian	Observasi lapangan
2.	Permasalahan dan harapan dalam pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan	Pendapat <i>stakeholder</i>	Wawancara
3.	Arahan prioritas pengembangan infrastruktur	Pendapat <i>stakeholder</i>	Kuisisioner

B. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder merupakan metode pengumpulan data, informasi dan peta kepada sejumlah instansi dan literatur terkait. Tujuan dari pengumpulan data sekunder adalah untuk mendukung data-data terkait Infrastruktur (sarana dan prasarana) kawasan minapolitan sebagai bahan dalam menentukan arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan Kabupaten Indramayu. Pengumpulan data sekunder terdiri atas:

1. Survei Instansi

Survei instansi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti data sekunder yang merupakan data-data yang bersifat pelengkap. Pada penelitian ini survei instansi dilakukan pada instansi yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian. Berikut ini terdapat data yang diperlukan beserta instansi yang dituju dalam pengumpulan data sekunder yaitu:

Tabel I.3 Daftar Instansi

No.	Data	Instansi	Lokasi
1.	- RDTR	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian	Jl. Letjen S. Parman, No. 15, Margadadi, Kec.

No.	Data	Instansi	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Strategis/Wilayah Pengembangan - Masterplan kawasan minapolitan - Peta fisik dasar 	dan Pengembangan Daerah	Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45211
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Masterplan kawasan minapolitan - Infrastruktur sistem kegiatan perikanan (hulu-hilir) 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pahlawan, No. 61, Lemahmekar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat 45212
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Masterplan kawasan minapolitan - Tenaga kerja sektor perikanan - Konsumsi hasil perikanan RT/tahun - Jenis komoditas ikan unggulan - Rantai bisnis perikanan (hulu-hilir) - Infrastruktur sistem kegiatan perikanan (hulu-hilir) 	Dinas Perikanan dan Kelautan	Jl. Raya Pabean Udik No.1, Pabeanudik, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat 45219
4.	Jumlah industri perikanan	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Mt Haryono No.11/ b, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, Jawa Barat 45222
5.	Tenaga kerja sektor perikanan	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Gatot Subroto No.11 Kec. Indramayu, Kab Indramayu, Jawa Barat 45216

2. Survei Literatur

Studi literatur atau kepustakaan dilakukan dengan meninjau isi dari literatur yang bersangkutan dengan tema penelitian ini, diantaranya berupa buku, hasil penelitian, dokumen rencana tata ruang, tugas akhir, serta artikel di internet dan media massa. Studi literatur dilakukan dengan membaca, merangkum dan kemudian menyimpulkan semua referensi tentang arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.

C. Metode Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat 2 metode sampling untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam

penelitian, yaitu *Probability Sampling & Non Probability Sampling*. Berikut ini tabel perbedaan dari kedua metode sampling tersebut:

Tabel I.4 Perbandingan Metode Sampling

No.	Metode Sampel	Prinsip
1.	<i>Probability Sampling :</i>	Memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
	<i>Simple Random Sampling</i>	Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen
	<i>Proportionate Stratified Random Sampling</i>	Digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
	<i>Disproportionate Stratified Random Sampling</i>	Digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.
	<i>Cluster Sampling (Area Sampling)</i>	Digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.
2.	<i>Non-Probability Sampling</i>	Tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atas anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
	<i>Sampling Sistematis</i>	Pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.
	<i>Sampling Kuota</i>	Menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.
	<i>Sampling Insidental</i>	Penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
	<i>Sampling Purposive</i>	Penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dari si peneliti.

No.	Metode Sampel	Prinsip
	<i>Sampling Jenuh</i>	Sampling dilakukan apabila populasinya kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.
	<i>Snowball Sampling</i>	Penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. begitu seterusnya, sehingga jumlah sampe semakin banyak.
	<i>Sensus/Sampling Total</i>	Pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi dibawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi.

Sumber : Sugiyono, 2018.

1. Pemilihan Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. Metode ini digunakan untuk menentukan responden dalam melakukan penyebaran kuisisioner untuk eksplorasi secara rinci mengenai infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu, serta dalam kuesioner mengenai prioritas arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu.

Dalam memudahkan penelitian maka dilakukan pengambilan sampel terhadap populasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan analisis pemetaan *stakeholder (Mapping Stakeholder)* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Untuk dapat memperoleh informasi yang interpretatif maka diperlukan *stakeholder*

utama yang memiliki kapasitas dan kompetensi di dalam lingkup infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu. *Stakeholder* yang dipilih haruslah memiliki kejelasan peran atau kontribusi dalam bidang yang dibutuhkan pada penelitian ini (dalam hal ini adalah infrastruktur yang dibutuhkan di wilayah penelitian), haruslah memiliki kejelasan kapasitas apa yang mereka punya dan *stakeholder* tersebut juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap obyek atau bidang penelitian.

Stakeholders adalah pihak-pihak baik perseorangan, kelompok atau suatu institusi yang terkena dampak atas intervensi suatu program, atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi hasil intervensi program tersebut. Menurut Brown (2001) *Stakeholder* adalah orang, organisasi atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah atau sumber daya alam tertentu. Para pemangku kepentingan adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya serta orang yang tidak memiliki pengaruh, tetapi penghidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya. Dalam penentuan *stakeholder* yang tepat dan benar-benar terkait dalam suatu program sangat kompleks dan memungkinkan adanya *stakeholder* yang tersembunyi atau belum teridentifikasi, maka oleh karena itu diperlukan suatu analisis untuk menentukan *stakeholder*.

Analisis *stakeholder* adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok atau individu yang berpengaruh dalam keutusan, pengelompokkan informasi yang ada, dan kemungkinan trade off bisa dipraktekan (Brown, 2001). Dalam penelitian ini analisis *stakeholder* digunakan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompetensi dan terlibat dalam pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu. Didalam analisis *stakeholder* pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan *stakeholder* kunci yaitu:

- Mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat, dilakukukan melalui studi literatur yang terkait dengan rumusan masalah.

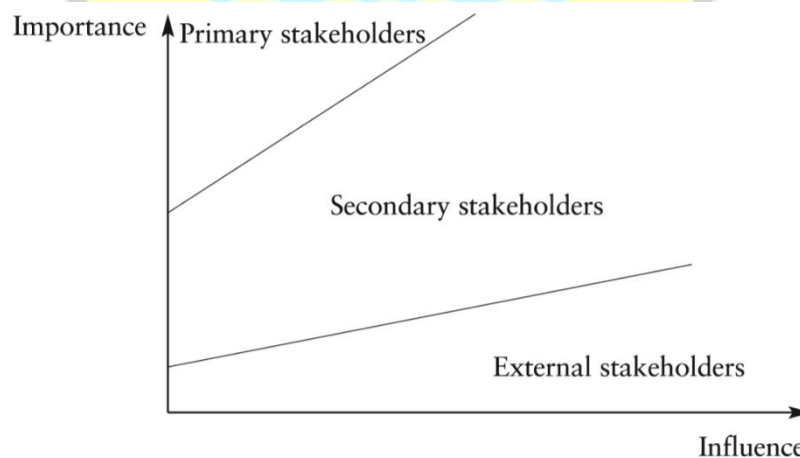
- Menganalisis kepentingan dan dampak potensial dari permasalahan yang ada terhadap masing-masing *stakeholder*, melalui wawancara terhadap *stakeholder* yang telah diidentifikasi.
- Menilai tingkat pengaruh (*influence*) dan tingkat kepentingan (*importance*) dari masing-masing *stakeholder*, dilakukan dengan melakukan pembobotan mulai dari tidak berpengaruh sampai sangat berpengaruh/penting dengan skala 1-5.

Para *stakeholder* dapat dikategorikan menurut tingkat pengaruh dan kepentingannya bagi pembuat keputusan, apakah mereka memiliki pengaruh yang relatif lebih atau kurang penting. Tingkat pengaruh dan kepentingan relatif menentukan apakah pemangku kepentingan adalah pemangku kepentingan primer, sekunder, atau eksternal. Berikut ini terdapat ilustrasi tabel dan grafik pengelompokan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh:

Tabel I.5 Pengelompokan Stakeholder Berdasarkan Tingkat Kepentingan

Kepentingan/Pengaruh	Pengaruh Rendah	Pengaruh Tinggi
Kepentingan Rendah	Kelompok <i>stakeholder</i> yang paling rendah prioritasnya	Kelompok <i>stakeholder</i> yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan opini
Kepentingan Tinggi	Kelompok <i>stakeholder</i> yang penting namun perlu pemberdayaan	Kelompok <i>stakeholder</i> yang paling kritis

Sumber : UNCHS Habitat, 2001



Gambar I.6 Grafik Kepentingan dan Pengaruh Relatif dari Berbagai Stakeholder

Sumber : Brown, 2001

Keterangan :

Stakeholder Primer memiliki pengaruh yang rendah terhadap hasil keputusan, tetapi kesejahteraan mereka penting bagi para pembuat keputusan (kepentingannya tinggi). Seringkali, pemangku kepentingan ini adalah mereka yang paling dirugikan dari suatu keputusan meskipun hal ini tidak selalu terjadi.

Stakeholder Sekunder bisa penting dan berpengaruh, mereka mungkin terlibat langsung dalam proses, dan merupakan bagian integral dalam pengambilan keputusan dan mereka yang terlibat dalam implementasi keputusan. Mereka relatif tidak penting, karena kesejahteraan mereka bukanlah prioritas. (ex.: lembaga pelaksana pemerintahan).

Stakeholder Eksternal adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil suatu proses melalui lobi para pembuat keputusan, tetapi kepentingannya cenderung kurang penting (ex: LSM).

Dalam penelitian ini *stakeholders* yang menguasai terkait infrastruktur untuk mengembangkan kawasan minapolitan Kabupaten Indramayu antara lain adalah sebagai berikut :

- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Pelaku Industri Hasil Perikanan;
- Pengusaha Tambak/Kolam;
- Nelayan;
- Petani Garam;
- Masyarakat; dan
- Akademisi.

Selanjutnya yaitu mengelompokkan para *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan relatif untuk menentukan apakah

termasuk pada *stakeholder* primer, sekunder atau eksternal yang kemudian akan digunakan sebagai responden dalam penelitian ini. Berikut ini terdapat tabel pengelompokan *stakeholder* penelitian yang digunakan:

Tabel I.6 Responden Penelitian

Kelompok Stakeholder	Stakeholder	Posisi Stakeholder	Alasan Pemilihan
<i>Governance</i>	BAPPEDA Kab. Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan 	Memberikan pertimbangan dalam perumusan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan terkait dengan infrastruktur pengembangan kawasan minapolitan.
	Dinas PUPR	Kepala Bidang Penataan Ruang	Sebagai penyusun pedoman penataan ruang terkait dengan strategi pembangunan kawasan minapolitan.
	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan - Kepala Bidang Perikanan Budidaya 	Sebagai penyusun peraturan daerah terkait dengan rencana pengembangan wilayah pesisir serta mampu memberikan pertimbangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di pengembangan kawasan minapolitan.
<i>Privat Sector</i>	Pelaku Industri Hasil Perikanan	Pemilik Industri Pengolahan Perikanan	Pelaku industri dapat memberikan masukan pada peneliti terkait dengan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.
	Pengusaha Tambak/Kolam	Pemilik Tambak/Kolam	Pengusaha tambak/kolam dapat memberikan masukan pada peneliti terkait dengan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.
	Nelayan	Nelayan	Nelayan dapat memberikan masukan pada peneliti terkait dengan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.
	Petani Garam	Pemilik Usaha Garam	Petani garam dapat memberikan masukan pada peneliti terkait

Kelompok Stakeholder	Stakeholder	Posisi Stakeholder	Alasan Pemilihan
			dengan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.
	Masyarakat	Masyarakat di Kawasan Minapolitan	Tokoh masyarakat dapat memberikan masukan pada peneliti terkait dengan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.
<i>Civil Society</i>	Akademisi atau Komunitas	Dosen atau Komunitas	Menjadi salah satu motor pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan.

2. Karakteristik Responden

Karakteristik sampel yang dipilih adalah responden yang ada merupakan tokoh kunci yang paling mengerti mengenai penelitian terkait dengan infrastruktur (sarana dan prasarana) untuk pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu. Berikut ini beberapa karakteristik responden yang dibutuhkan sebagai berikut:

- a. Karakteristik responden (*governance*)
 - 1) Usia sekitar 25-55 tahun
 - 2) Lama bekerja min. 3 tahun
 - 3) Bertempat tinggal di Kab. Indramayu
 - 4) Jabatan min ketua atau sekretaris bidang terkait
- b. Karakteristik responden (*private sector*)
 - 1) Usia sekitar 25-55 tahun
 - 2) Lama bekerja min. 3 tahun
 - 3) Bertempat tinggal di Kab. Indramayu
 - 4) Pemilik usaha
 - 5) Mengetahui tentang pengembangan kawasan minapolitan
- c. Karakteristik responden (*civil society*)
 - 1) Usia sekitar 25-55 tahun
 - 2) Mengetahui tentang pengembangan kawasan minapolitan
 - 3) Bergerak dibidang infrastuktur wilayah/wilayah pesisir

3. Penentuan Jumlah Responden

Perhitungan jumlah responden dibedakan berdasarkan kelompok *stakeholders* yaitu *governance*, *private sector* dan *civil society*. Responden yang ada diharapkan mengetahui dan mengerti terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu serta memenuhi kriteria yang ada. Berikut ini tabel jumlah responden yang digunakan:

Tabel I.7 Jumlah Responden *Governance* dan *Civil Society*

Kelompok Stakeholder	Stakeholder	Jumlah Responden
<i>Governance</i>	BAPPEDA Kab. Indramayu	1
	Dinas PUPR	1
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
<i>Civil Society</i>	Akademisi dan Komunitas	2

Tabel I.8 Jumlah Responden *Private Sector*

Stakeholder	Kecamatan	Jumlah Responden
Pelaku Industri Hasil Perikanan	Juntinyuat	5
	Balongan	5
	Indramayu	5
	Sindang	5
	Pasekan	5
	Cantigi	5
	Kandanghaur	5
	Patrol	5
	Sukra	5
Pengusaha Tambak/Kolam	Krangkeng	5
	Karangampel	5
	Juntinyuat	5
	Balongan	5
	Indramayu	5
	Sindang	5
	Cantigi	5
	Pasekan	5
	Losarang	5
	Kandanghaur	5
	Sukra	5
Nelayan	Karangampel	5
	Juntinyuat	5
	Balongan	5
	Indramayu	5
	Sindang	5
	Cantigi	5
	Pasekan	5
	Losarang	5
	Kandanghaur	5
Sukra	5	

Stakeholder	Kecamatan	Jumlah Responden
Petani Garam	Patrol	5
	Krangkeng	5
	Indramayu	5
	Losarang	5
	Kandanghaur	5
	Cantigi	5
Masyarakat	Krangkeng	5
	Karangampel	5
	Juntinyuat	5
	Balongan	5
	Indramayu	5
	Sindang	5
	Cantigi	5
	Pasekan	5
	Losarang	5
	Kandanghaur	5
	Sukra	5
	Patrol	5

Berdasarkan tabel di atas, total jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 245 orang.

1.5.3 Metode Analisis

Metode analisis adalah cara yang digunakan untuk menguraikan informasi yang didapat sehingga menjadi informasi baru. Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

A. Karakteristik Kawasan Minapolitan

Dalam melakukan analisis identifikasi karakteristik kawasan minapolitan digunakan metode deskriptif kuantitatif yang didapat dari dokumen serta peraturan terkait. Dokumen dan peraturan tersebut seperti Rencana Strategis, RTRW, RZWP3K, RPJM, letak geografis kawasan, kondisi fisik dasar, guna lahan, kondisi demografi, struktur perekonomian, komoditas unggulan perikanan, kondisi perikanan (volume dan nilai produksi, produktivitas, harga ikan), kesesuaian lahan perairan peruntukan perikanan, sistem dan mata rantai produksi (hulu-hilir), serta potensi kegiatan ekonomi kawasan minapolitan.

B. Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur Kawasan Minapolitan

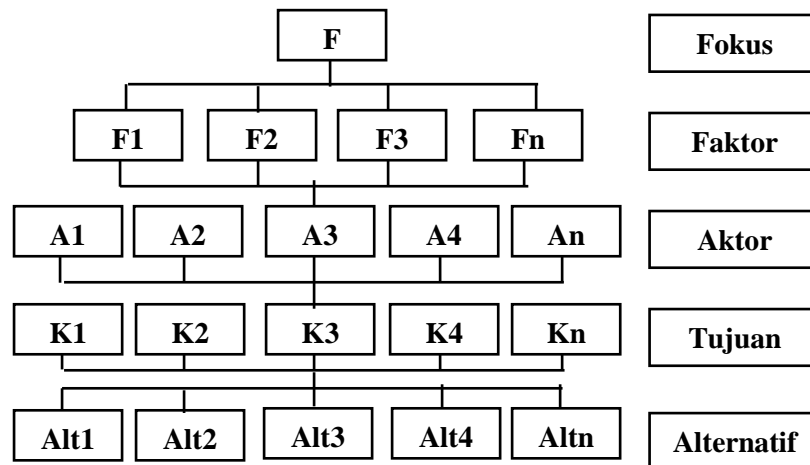
Dalam melakukan analisis identifikasi ketersediaan infrastruktur kawasan minapolitan digunakan metode perbandingan dengan cara membandingkan ketersediaan infrastruktur yang ada dilapangan terhadap peraturan terkait yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan. Sedangkan untuk melihat kondisi infrastruktur kawasan minapolitan digunakan metode deskriptif kualitatif, diharapkan dapat menggambarkan secara terperinci dan mendalam terkait dengan infrastruktur kawasan minapolitan.

C. Arahana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Minapolitan

Analisis yang digunakan dalam merumuskan arahan pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan di Kabupaten Indramayu yaitu analisis AHP (*Analitycal Hierarchi Process*). Analisis AHP ini diharapkan dapat menentukan arahan mana yang dapat menjadi prioritas utama untuk mengambil keputusan bagi pengembangan infrastruktur kawasan minapolitan. AHP merupakan salah satu teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang komprehensif karena sifatnya yang multi atribut untuk menangani masalah yang kompleks baik aspek kualitatif dan kuantitatif. AHP telah banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dengan multi kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya, dan penentuan prioritas dari strategi-strategi dalam pembangunan wilayah.

Dalam metode AHP, ada 3 prinsip dalam memecahkan persoalan dan menentukan alternatif pilihan keputusan yaitu (1) penyusunan hirarki; (2) penetapan prioritas; dan (3) konsistensi logis. Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Berikut ini terdapat gambar struktur hirarki dalam AHP:



Gambar I.7 Perbandingan Metode Sampling

Sumber : Lutfi, 2015

Keterangan :

- Tingkat 1 : Goal/Fokus (F), yaitu apa yang menjadi inti fokus permasalahan yang ingin dipecahkan AHP.
- Tingkat 2 : Faktor atau aspek yang berhubungan dengan goal, dalam gambar terdiri dari F1, F2, F3, Fn.
- Tingkat 3 : Aktor atau stakeholder, yaitu orang-orang yang terlibat dalam hirarki untuk mencapai tujuan dan menjadi objek. Misalnya terdiri dari stakeholder A1, A2, A3, A4, An.
- Tingkat 4 : Kriteria Tujuan, yaitu hal-hal yang menjadi kriteria atas tujuan yang telah ditetapkan.
- Tingkat 5 : Alternatif, yang berisi tentang alternatif strategi pembangunan yang akan dilakukan, misalnya dengan Alt1, Alt2, Alt3, Alt4, Altn.

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Kadarsyah Suryadi dan Ali Ramdhani, 1998): [4]

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.

Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama.

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hirarki dilanjutkan dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan).

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya.

Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5.

4. Melakukan Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak $n \times [(n-1)/2]$ buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.

Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat di bawah :

Tabel I.9 Intensitas Kepentingan menurut Saaty

Intensitas Kepentingan	
1	Kedua elemen sama pentingnya. Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya.
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2, 4, 6, 8	Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan.
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i

Sumber : Saaty, 1988

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.
6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan.

Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.

8. Memeriksa konsistensi hirarki.

Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10 %.

Tabel I.10 Matriks Analisis

No.	Sasaran	Substansi	Indikator	Metodologi	Teknik Analisis	Jenis Data	Instansi	Output
1.	Identifikasi karakteristik Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu	Kesesuaian dengan rencana	<ul style="list-style-type: none"> RDTR Kab. Indramayu Rencana Strategis/Wilayah Pengembangan Kab. Indramayu Masterplan Kawasan Minapolitan Kab. Indramayu RPIJM Kab. Indramayu RPI2JM Kab. Indramayu Kesesuaian lahan perairan peruntukan perikanan 	Pengumpulan data dari instansi	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Dinas Perikanan dan Kelautan 	Kesesuaian arahan pengembangan kawasan minapolitan dengan rencana/peraturan yang ada
		Industri	Industri pengolahan hasil perikanan	Pengumpulan data dari instansi	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah industri pengolahan hasil perikanan
		Komoditas unggulan perikanan	Jenis ikan unggulan	Pengumpulan data dari instansi	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	Dinas Perikanan dan Kelautan	Komoditas unggulan berdasarkan jenis ikan
		Rantai Bisnis Peikanan	Kegiatan perikanan dari hulu-hilir	Wawancara	Deskriptif kualitatif		Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Fisik dasar	<ul style="list-style-type: none"> Tematik C-L Aliran DAS Tutupan lahan Batimetri Sungai Jenis tanah 	Pengumpulan data dari instansi	Pemetaan	SHP	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> Peta Tematik C-L Peta Aliran DAS Peta Tutupan lahan

No.	Sasaran	Substansi	Indikator	Metodologi	Teknik Analisis	Jenis Data	Instansi	Output
			<ul style="list-style-type: none"> Jaringan irigasi Topografi 					<ul style="list-style-type: none"> Peta Batimetri Peta Sungai Peta Jenis tanah Peta Jaringan irigasi Peta Topografi
2.	Mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi infrastruktur (sarana dan prasarana) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu	Sub-sistem bisnis perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Balai Benih Ikan (BBI), <i>Hatchery</i>; Kolam, tambak atau wadah budidaya; Gudang pakan; Peralatan penangkapan ikan; dan Armada penangkapan ikan. 	Pengumpulan data dari instansi dan observasi lapangan	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	Dinas Perikanan dan Kelautan	Ketersediaan dan kondisi infrastruktur (sarana dan prasarana) Kawasan Minapolitan
		Sub-sistem usaha budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan tempat pengumpul hasil (<i>Handling Space</i>) produk perikanan budidaya; dan Dermaga, tempat pendaratan ikan dan tambatan perahu pada kawasan nelayan. 	Pengumpulan data dari instansi dan observasi lapangan	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Sub-sistem hilir-pengolahan hasil	<ul style="list-style-type: none"> Sarana penjemuran rumput laut dan tempat penjemuran ikan; Gudang penyimpanan hasil perikanan/rumput laut, termasuk 	Pengumpulan data dari instansi dan observasi lapangan	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Koperasi UKM Perdagangan 	

No.	Sasaran	Substansi	Indikator	Metodologi	Teknik Analisis	Jenis Data	Instansi	Output
			<p>didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (<i>cold storage</i>) <i>packing house</i>, sebagai tempat sortasi dan pengepakan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana industri kecil, termasuk <i>food services</i>, seperti: tempat pembuatan keripik udang/ikan, ikan asap, abon dsb. 				dan Perindustrian	
		Sub-sistem hilir-pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat pelelangan ikan; dan • Pasar ikan 	Pengumpulan data dari instansi dan observasi lapangan	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	Dinas Perikanan dan Kelautan	
		Sub-sistem penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana utilitas umum, seperti: jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telpon dan internet; • Sarana pelayanan umum, seperti: sarana perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, perkantoran, peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau, dll; dan • Sarana kelembagaan, seperti: badan 	Pengumpulan data dari instansi dan observasi lapangan	Deskriptif kuantitatif	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	Sasaran	Substansi	Indikator	Metodologi	Teknik Analisis	Jenis Data	Instansi	Output
			pengelola, kantor perbankan, koperasi, unit-unit usaha dan lain-lain.					
3.	Terumuskannya arahan pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu	Pengembangan infrastruktur Kawasan Minapolitan	Infrastruktur sistem kegiatan perikanan (hulu-hilir)	Penyebaran kuisisioner	Analisis AHP		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Dinas Perikanan dan Kelautan; • Pelaku Industri; • Pengusaha Tambak; • Nelayan; • Masyarakat; dan • Akademisi atau Ahli Infrastruktur. 	Arahan prioritas pengembangan infrastruktur Kawasan Minapolitan

1.5.4 Batasan Studi

Berikut ini batasan studi dalam yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Lokasi penelitian adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan bibir pantai, memiliki PPI/TPI serta telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu.
2. Infrastruktur yang diteliti hanya hard infrastruktur saja.
3. Identifikasi kesesuaian lahan berdasarkan guna lahan yang ada di lokasi penelitian.
4. Identifikasi ketersediaan dan kondisi infrastruktur kawasan minapolitan terkait dengan sistem dan mata rantai produksi (hulu-hilir) berupa sub-sitem minapolitan hulu (*up-stream agribusiness*), sub-sitem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*) serta sub-sitem agribisnis hilir di kawasan minapolitan Kabupaten Indramayu.
5. Tidak menghitung proyeksi kebutuhan infrastruktur Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang.
6. Tidak membahas kebutuhan infrastruktur untuk kegiatan pariwisata yang ada di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu.
7. Tidak mengkaji terkait biaya yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur.
8. Tidak mengkaji terkait dampak dan resiko yang ditimbulkan dari pengembangan infrastruktur yang dilakukan.
9. Tidak mengkaji dan menghitung peluang usaha dan investasi dari komoditas unggulan yang ada.

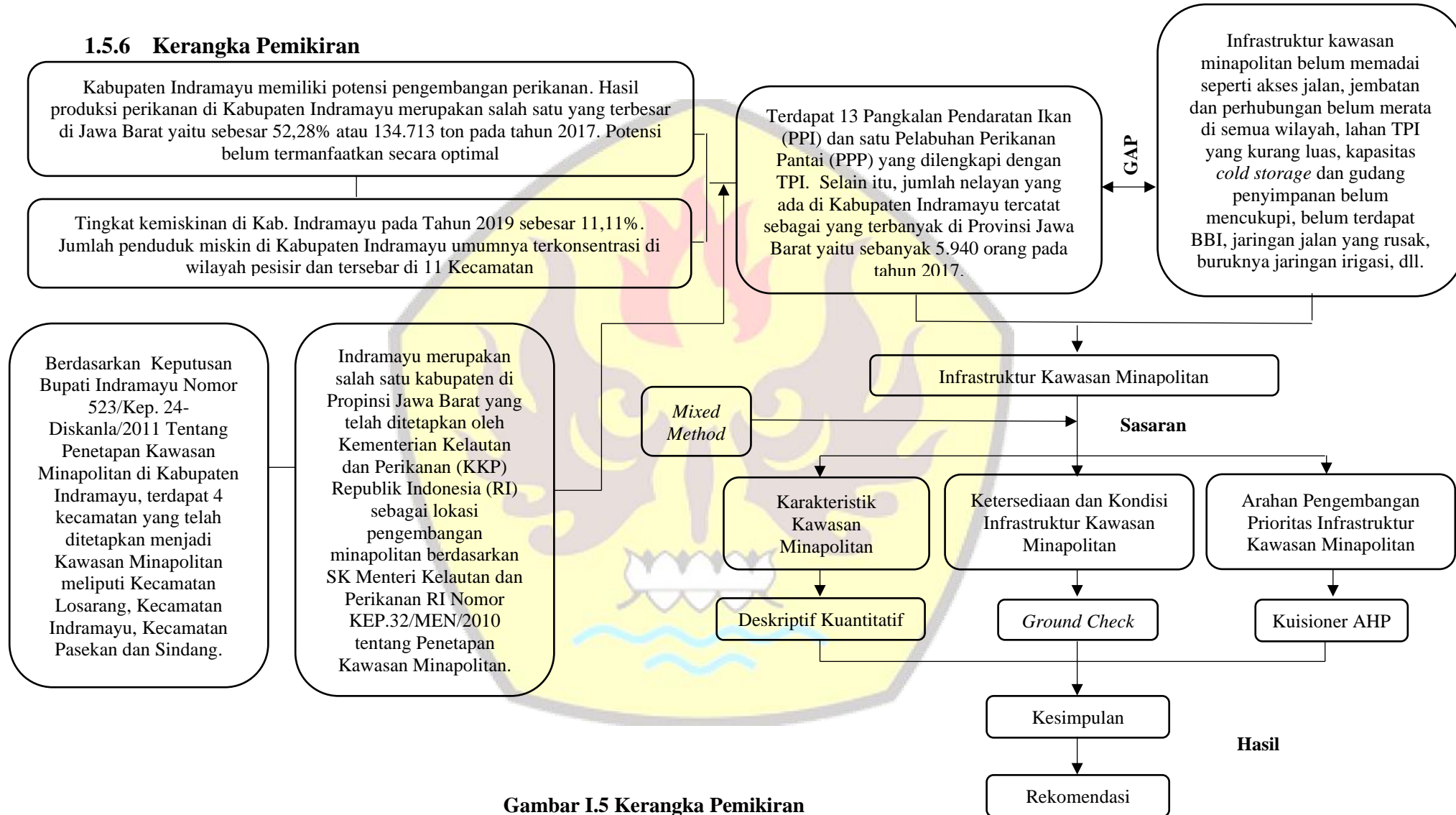
1.5.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam Arahan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu mempertimbangkan dari peraturan terkait yang berlaku yang terdiri dari:

No.	Faktor Penelitian	Variabel Penelitian	Sumber/Acuan	Keterangan
1.	Sub-Sistem Bisnis Perikanan	1. Balai benih ikan, Hatchery 2. Kolam/Tambak 3. Gudang pakan 4. Alat tangkap 5. Armada (Perahu)	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan	Dalam Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan terdapat prinsip efisiensi yang artinya pembangunan sektor

No.	Faktor Penelitian	Variabel Penelitian	Sumber/Acuan	Keterangan
2.	Sub-Sistem Usaha Budidaya	1. <i>Handling space</i> 2. Dermaga	Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan	kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. sehingga mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.
3.	Sub-Sistem Hilir-Pengolahan Hasil	1. Tempat penjemuran 2. <i>Cold storage</i> 3. Industri/UMKM		
4.	Sub-Sistem Hilir-Pemasaran	1. Tempat Pelelangan Ikan 2. Pasar ikan		
5.	Sub-Sistem Penunjang	1. Utilitas: Jalan, Air Bersih, Sanitasi, Persampahan, Drainase, Listrik, dan Telepon.		
		2. Pelayanan Umum: Transportasi, Perbelanjaan, Kesehatan, Pendidikan, Perkantoran, Peribadatan, Rekreasi, Olahraga, dan RTH. 3. Sarana Kelembagaan: Badan Pengelola, Bank, Koperasi, dll.		

1.5.6 Kerangka Pemikiran



Gambar I.5 Kerangka Pemikiran

1.5.7 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, isu permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian berdasarkan isu permasalahan yang muncul, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah, metode yang digunakan dalam penelitian, batasan studi penelitian, kerangka berpikir, serta sistematika penyusunan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan aturan terkait pengembangan wilayah dan pesisir, infrastruktur, konsep pengembangan minapolitan, dan studi terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum karakteristik Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan analisis yang dilakukan untuk menjawab sesuai dengan sasaran penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S., & Syarifudin, D. (2015). *Identification of The Border Areas Typology Inter Regency/City And Human Development Index In West Java*. *Jurnal Planologi Unpas*, 3(1), 1-22.
- Akliyah, L. S., Asyiwati, Y., & Putri, S. E. (2014). *Identifikasi Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu*. *Prosiding SNaPP 2014 Sains, Teknologi dan Kesehatan*, 4(1), 1–17.
- Brown, K., Tompkins, E., & Adger, W. N. (2001). *Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-Making First Edition*. Norwich: University of East Anglia.
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). *Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara*. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 145–157.
- Firmansyah, F., Syarifudin, D., & Rohjan, J. (2019). *The Risk Assessment of Multi Hazard Area: A Case of Mitigation Consider in Spatial Planning of Bukittinggi City*. *Indonesian Journal of Geography*, 51(3), 304-323.
/*doi:http://dx.doi.org/10.22146/ijg.33298*/
doi:https://doi.org/10.22146/ijg.33298
- Hidayat, N. (2016). *Arahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Lamia, L. B., Rengkung, M. M., & Takumansang, E. D., (2017). *Ketersediaan Prasarana Sarana dalam Mendukung Kawasan Minapolitan Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Spasial: Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(2), 19–27.
- Morissan. (2012). *Metode Penelitian Survei Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA.
- Nugraha, G., Dewi, I. K., & Sunaryadi, A. (2015). *Identifikasi Potensi dan Kendala Kawasan Minapolitan Palabuhanratu*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 1(1), 1–10.
- Nurzaman, S. S. (2012). *Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia Cetakan Pertama*. Jakarta: Penerbit ITB.
- Putra, E. D. (2011). *Potensi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Putri, S. E. (2015). *Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap yang Berdaya Saing untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Indramayu*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Raharja, A. B., Aji, S., & Syarifudin, D. (2020). *Typology of The Coastal Countryside in Supporting Development of North Coast Region in West Java*.

- TATALOKA, 22(4), 486-496. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.4.486-496>
- Rahman, N. (2017). *Identifikasi Potensi dan Kendala Serta Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Guna Mendukung Pengembangan Lahan Tambak Pada Kawasan Hinterland Minapolitan di Kabupaten Serang*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Sain, B. C., & Knecht, R. W. (1998). *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*. Washington, D C: Island Press.
- Sam'un, Mohamad. (2017). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Minapolitan Perikanan Tangkap PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Karangsong Indramayu*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Sam'un, Mohamad. (2020). *Analisis Strategi untuk Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap PPI Karangsong yang Efektif*. *Jurnal Mina Sains*, 6(2), 104–113.
- Sari, R. A., & Chofyan, I. (2016). *Arahan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Galang Kota Batam*. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(1), 95–104.
- Syaiful Amar. (2009). *Sistem Pendukung Keputusan Pengukur Kualitas Software dengan Menerapkan Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP)*. 1993.
- Syarief, A., Rustiadi, E., & Hidayat, A. (2014). *Analisis Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Indramayu*. *Jurnal Tata Loka*, 16(2), 84–93.
- Syarifudin, D. (2011). *Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam perspektif Penanggulangan Kemiskinan: Wilayah Studi Kabupaten Ciamis*. *Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusia* Januari, 13, 67-91.
- Syarifudin, D., & Ishak, R. F. (2020). *The Importance of Rural Social Productive Space to Increase the Social Capital of Agribusiness Community in Agropolitan Area*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(1), 67-83. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.67-83>
- Syarifudin, D., Aji, S., & Surdia, R. M. (2019). *IbM Kelompok Usaha Wanita Budidaya Kelinci Pedaging di Desa Wargasaluyu Kabupaten Bandung Barat*. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 49-60.
- Widiastuti, T. (2017). *Identifikasi Lokasi Potensial untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Ciamis*. Bandung: Universitas Pasundan.
- _____, BPS Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2019
- _____, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 2019
- _____, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Agropolitan & Minapolitan: Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan Tahun 2012
- _____, Keputusan Bupati Indramayu Nomor 523 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu
- _____, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan
- _____, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

- _____, Laporan Akhir Minapolitan Tahun 2011
- _____, Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Indramayu Tahun 2011
- _____, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031
- _____, Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029
- _____, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2029
- _____, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan
- _____, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan
- _____, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 – 2018
- _____, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
- _____, Rencana Strategis Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021
- _____, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2013
- _____, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
- _____, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang